

## **BAB II**

### **GAMBARAN TENTANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Partai Keadilan Sejahtera. Bab ini mengemukakan sejarah lahirnya Partai Keadilan Sejahtera, Platform Partai Keadilan Sejahtera, yang menjelaskan identitas partai, visi dan misi partai serta tujuan partai. Sistem pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera

#### **A. Sejarah Lahirnya PKS**

Sejarah lahirnya Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera tak lepas dari kondisi riil sejarah umat Islam Indonesia dari Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto di era orde baru. Itu bisa dilihat dari diskriminasi yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini terhadap umat Islam.

Partai Keadilan adalah partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pendiri Partai Keadilan yang berasal dari kalangan kampus dalam negeri yang diantaranya berasal dari mantan aktivis Universitas Negeri ternama di Indonesia, seperti, UI, IPB, UNDIP, ITB dan UGM.

Lahirnya gerakan dakwah kampus yang merupakan cikal bakal kemunculan kader-kader Partai Keadilan di era reformasi berawal dari munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respon dari tekanan politik yang dilakukan pemerintah orde baru ketika itu terhadap umat Islam, dan juga adanya ruang publik yang relatif lapang yang bernama masjid atau mushalla kampus, tempat dimana idealisme kaum muda Islam itu mengalami persemaian ideal secara tepat. Sementara masjid kampus adalah basis yang dijadikan benteng pertahanan sekaligus basis gerakan dan faktor diatas membuat anak-anak muda bersemangat dalam perjuangan dakwah Islam yang

semuanya bermula dari masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung). Kelompok santri inilah yang pertama kali membuat kelompok-kelompok kecil bercirikan Islam.

Mereka terlembagakan dalam lingkungan usrah-usrah yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Orientasi ke-ikhwanul muslimin-an inilah yang menjadi pintu masuk bagi alumni Timur Tengah sebagai narasumber atau penterjemah gagasan-gagasan Islam Timur Tengah di Indonesia, mereka terlibat dalam kegiatan dakwah kampus. Kenyataan bahwa Timur Tengah merupakan 63 Usrah adalah istilah dalam Bahasa Arab yang artinya “keluarga”, merupakan bentuk gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh para aktivis mahasiswa Islam di masjid Salman ITB dan kemudian dikenal di kalangan aktivis muda Islam pada akhir 70 an dan awal 80-an berpartisipasi dalam dinamika politik dan social Indonesia semakin terbuka.

Aktivis-aktivis gerakan ini mulai meluaskan sayapnya. Kesempatan untuk partisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah rezim yang berkuasa selama 32 tahun mengalami kehancuran.

Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak, akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk merealisasikan cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Sedangkan dalam bidang kesejahteraan umat Islam dapat dikatakan sebagai penghuni terbesar dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktifis dakwah Islam akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam merupakan bentuk transformasi terakhir yang dijalani oleh gerakan dakwah

kampus, guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang, maka akhirnya merekapun sepakat untuk mengokohkan sebuah partai yang diberi nama Partai Keadilan<sup>1</sup>

Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survey yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ke tengah public pada era reformasi, apakah bentuk organisasi massa atau organisasi politik, atau tetap mempertahankan penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam bentuk yayasan atau lembaga-lembaga dakwah.<sup>2</sup> Bentuk transformasi GDK (Gerakan Dakwah Kampus) menjadi Partai Keadilan (PK) barangkali bentuk transformasi paling fenomenal yang dilakukan oleh gerakan dakwah ini. Dikatakan fenomenal karena beberapa alasan, diantaranya:

1. Pilihan mendirikan partai politik merupakan bentuk pemunculan publik yang paling utuh dari gerakan dakwah yang selama ini bergerak dengan banyak nama dan banyak kantong-kantongnya itu.
2. Pilihan untuk mendirikan partai politik itu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah diduga sebelumnya bahkan oleh para kadernya sendiri dan memicu kontroversi.
3. Pilihan tersebut membawa konsekuensi pada masuknya gerakan dakwah ke dalam politik praktis dengan logika dan sistemnya sendiri yang di masa lalu merupakan sesuatu yang sempat mereka jauhi. Artinya selama ini trade mark mereka adalah aktivitas dakwah sedangkan berpolitik selama ini hampir-hampir mereka tidak pernah sentuh<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sekretariat DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta:DPP Partai Keadilan, Desember 1998) Cet-1, h.18

<sup>2</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 228

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 215-216

Menurut Nur Mahmudi Isma'il (Presiden PK pertama), menyebut akarhistories dari ideologis Partai Keadilan sangatlah panjang. Karena itu sangat sulit untuk mengelompokkan mereka ke dalam genre politik tertentu, karena dalam sejarahnya pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik manapun. Kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis Islam yang masa lalu direpresentasikan dengan baik oleh Masyumi tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini juga mewakilkan aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi tersebut. Sebelumnya memang ada dugaan bahwa kelompok aktivis dakwah yang mendirikan Partai Keadilan ini mempunyai kedekatan emosional dan politik dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi dakwah yang didirikan para mantan aktivis Masyumi dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini sebelumnya berbasis. Akan tetapi pasca reformasi jelaslah sudah perbedaan diantara keduanya. DDII membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan anak-anak muda aktivis Tarbiyah ini mendirikan Partai Keadilan. Para aktivis gerakan dakwah ini memakai proses reformasi yang terjadi sebagai Harakatul Ishlah (gerakan perbaikan) yang merupakan buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan.<sup>4</sup>

Partai Keadilan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan jumlah massa yang hadir pada saat itu lebih dari 50.000 orang.<sup>5</sup> Kehadiran Partai Keadilan dalam pentas perpolitikan Indonesia pasca jatuhnya Soeharto menjadi sebuah fenomena yang menakjubkan banyak pihak. Betapa tidak, dari seluruh partai besar yang ada pada era reformasi, hanya PK-lah yang konstituennya tidak berasal dari kelompok-kelompok

---

<sup>4</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 220-221

<sup>5</sup> *Republika* 10 Agustus 1998, h.3

masyarakat atau komunitas politik yang pernah eksis sebelumnya, juga sulit memastikan mereka dari bagian-Bagian mainstream Islam seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>6</sup>

Dari segi kelahirannya PK sangat dipengaruhi oleh gerakan Islam di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin. Tesis ini diakui oleh pemikir ternama Ikhwanul Muslimin DR. Yusuf al-Qardhowi, namun hal ini dibantah oleh Sekjend PK H. Anis Matta, Lc, ia menegaskan, “Konteks pernyataan DR Yusuf al-Qordhowi diatas menjelaskan, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin ada di seluruh dunia dan salah satu yang dekat dengan pemikiran IM di Indonesia adalah PK”<sup>7</sup>. Namun demikian Presiden PK yang kedua DR Hidayat Nurwahid mengatakan “Substansi itu lebih penting daripada nama, nama besarpun tak ada nilainya kalau tidak dijabarkan dalam kehidupan”<sup>8</sup>, tetapi lain lagi pendapat yang dikemukakan oleh Cendikiawan Muslim, Nurcholis Madjid, ia berpendapat bahwa Partai Keadilan tidak mengambil contoh atau inspirasi dari mana-mana, ia mempunyai style tersendiri bagi seorang yang terpelajar.<sup>9</sup>

Bulan Agustus 1999, pesta demokrasipun digelar dan PK merupakan salah satu peserta Pemilu saat itu, pada tanggal 2 Agustus 1999 PK menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu. Prestasi perolehan suara pada saat itu cukup membuat banyak kalangan berdecak kagum, PK masuk dalam urutan tujuh besar partai pemenang Pemilu, PK meraih 1.436.565 suara atau 1,36 % dari total suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR RI (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Provinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Bahkan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perolehan suara PK melebihi Partai Kebangkitan

---

<sup>6</sup> Panjimas edisi 20 Februari-05 Maret 2003 h.39

<sup>7</sup> Panjimas edisi 20 Februari-05 Maret 2003, h.11

<sup>8</sup> Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam menurut PK* (Jakarta; Al-Jannah Pustaka, Februari 2004), h.24

<sup>9</sup> Dikutip dari [www.pk-sejahtera.or](http://www.pk-sejahtera.or), rubric liputan media

Bangsa dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki hubungan histories dengan NU dan Masyumi.<sup>10</sup>

Pada pesta demokrasi tahun 2004, pemerintah membuat peraturan baru untuk peserta Pemilu, yaitu partai-partai yang ingin menjadi peserta Pemilu 2004 baik partai baru maupun partai lama harus memenuhi 2% atau lebih perolehan suara dari pendukungnya. Maka pada tanggal 17 April 2003, PK mengadakan Musyawarah Majelis Syuro XIII (Musyawarah Nasional Istimewa) di Asrama Haji

Pondok Gede Bekasi dan menghasilkan keputusan untuk merekomendasikan PK untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar

1423 H, selanjutnya dideklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Silang Monas Jakarta yang dihadiri 40.000 masa.<sup>11</sup>

Sesuai hasil Musyawarah Nasional Istimewa Partai Keadilan pada tanggal 17 April 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi yang merekomendasikan penggabungan Partai Keadilan (PK) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita, maka mereka menandatangani kesepakatan di hadapan notaries pada tanggal 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik Di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan professional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan kearah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai, dari sebuah entitas yang belum dikenal

---

<sup>10</sup> Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam menurut PK*, h. 25

<sup>11</sup> Dikutip dari [www.pk-sejahtera.org](http://www.pk-sejahtera.org)

sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini, sebagai partai yang menduduki peringkat 6 dalam Pemilu 2004 lalu.

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktivitasnya, PKS dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), kebijakan dasar partai dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (*Central Board*) yang berpusat di Jakarta yang dikelola secara full time, selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Saat ini, PKS memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW=setingkat provinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD= setingkat kota/kabupaten) dan 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC= setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PKS juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PIPKS).

PKS adalah partai politik modern yang terorganisir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya yang saat ini tercatat lebih dari 400.000 kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri.<sup>12</sup>

## **B. Visi dan Misi Partai**

### **Visi Umum:**

“Sebagai Partai Da’wah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat Dan Bangsa.”

### **Visi Khusus:**

”Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani”.

---

<sup>12</sup> Dikutip dari [www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur](http://www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur)

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil 'alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

### **MISI**

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dikutip dari [www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur](http://www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur)

## **C. Sistem Pengkaderan dan Agenda-agenda Partai Keadilan Sejahtera**

### **a. PKS Sebagai Partai Kader**

#### **1. Sistem Pembinaan**

Metamorfosa gerakan Islam memasuki tahapan baru ketika lahirnya Partai Keadilan mengalami transformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pelanjut perjuangan. Pola rekrutmen dan pembinaan yang diterapkan adalah melalui halaqoh-halaqoh tarbiyah yang sekarang tidak hanya ada di masjid-masjid kampus.

Pola hubungan dalam proses pendidikan antar aktifis dakwah diatur dalam sebuah strata yang ketat, dimana intensitas keterlibatan seorang aktifis diatur dalam sebuah tata kerja yang rapih. Proses pembinaan yang ada di PKS dilaksanakan dengan pola-pola pembinaan dalam system tarbiyah seperti liqo', dauroh, rihlah, mabit, dll. Program-program pembinaan yang ada bukan hanya diperuntukkan bagi anggota yang baru masuk (pendatang), melainkan diperuntukkan bagi semua tingkat. Hal itu ditunjukkan dari program pertemuan dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan satu pecan sekali di kepengurusan DPP PKS.

Pertemuan dan pembinaan agama tersebut bersifat komprehensif (menyeluruh), terkadang pembinaan tersebut dilakukan pada bagian masing-masing departemen yang ada secara terpisah atau secara penggabungan dari seluruh deapartemen yang ada, dari tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sampai DPRa (Dewan Pimpinan Ranting).

Adapun tingkat pengkaderan yang ada di Partai Keadilan Sejahtera adalah;

1. Jenjang Pemula
2. Jenjang Madya; Kader memiliki sifat-sifat merasakan urgensi berkorban dengan waktu dan harta, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam lingkup amal jama'I dan melakukan pembelaan terhadap

3. Dakwah
4. Jenjang Dewasa; Kader melaksanakan semua tugas dan beban yang diminta, disertai upaya-upaya pengenalan berbagai kondisi dakwah (partai) dan sejarahnya. Kader menjadi seorang sufi total dari segi ruhiyah, bercorak disiplin militer dari segi praktek dan tidak merasa terpaksa dalam beramal
5. Jenjang Ahli; Kader melanjutkan tujuan kaderisasi Anggota Dewasa, sekaligus menjadi cermin atau teladan bagi kader dalam pelaksanaan tugas-tugas dakwah.

## **2. Manajemen Organisasi**

Dalam rangka membentuk organisasi yang baik, maka seseorang perlu memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dan mempunyai manajemen organisasi yang baik. Para ahli memberikan beragam prinsip-prinsip organisasi yang dapat diringkas sebagai berikut;

1. Mempunyai tujuan yang jelas
2. Terdapat jenjang kepemimpinan dan system kepemimpinan yang layak
3. Mempunyai satu kesatuan perintah/komando
4. Terdapat pembagian wewenang yang jelas antar pemimpin
5. Terdapat system pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas
6. Terdapat system pengendalian /rentang kendali
7. Terdapat garis koordinasi antara pimpinan dan anggota organisasi
8. Terdapat fleksibilitas cara pelaksanaan berbagai kegiatannya

Melihat poin-poin persyaratan agar bisa dikategorikan kedalam organisasi yang baik tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh PKS, misalnya; tujuan pendirian partai termanifestasi ke dalam visi dan misi yang jelas yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Kejelasan tentang jenjang kepemimpinan dan sistemnya terlihat pada struktur organisasi dan tugas-tugas pengurus organisasi yang jelas. Memiliki

satu kesatuan komando, misalnya; dalam system kepengurusan ada Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) yang menjabat sebagai lembaga tertinggi partai.

#### **b. Strategi Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera**

Prinsip emas atau *golden principle* yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh komponen menurut PKS adalah mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil dan Sejahtera”.

Menegakkan prinsip syuro dalam partai, menurut mantan Presiden PKS, DR.H.M. Hidayat Nurwahid mempengaruhi proses penegakkan prinsip demokrasi dalam skala nasional. Musathil dapat meraih cita-cita bangsa yang adil, demokratis, dan sejahtera, apabila PKS tidak memulainya sendiri, PKS harus senantiasa mematangkan diri dalam proses belajar di bawah naungan pentadbiran Ilahi.

Dalam hal penjaringan suara konstituen itu, peran sebuah platform menjadi penting selain memiliki AD/ART dan Prinsip Kebijakan yang diperjuangkan. Kejelasan platform merupakan modal yang berharga bagi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan partai di tengah masyarakat yang beragam. Kejelasan Platform PKS dituntut untuk tidak hanya sebagai kajian, akan tetapi memanifestasikan platform tersebut kedalam kegiatan yang nyata.

Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa kehadiran PKS dalam lapangan ekonomi, social, budaya dan kegiatan keagamaan jauh melampaui tugas-tugas politik formal yang kita gencarkan. PKS telah menanam investasi moral (*moral investmen*) dan memupuk modal social (*social capital*) dalam waktu yang lama. Secara sederhana, tema besar (*tag line*) perjuangan PKS ditetapkan oleh Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) dalam Munas II di Bali Tanggal 20 Februari 2008 sebagai “BERSIH, PEDULI dan PROFESIONAL”, walaupun memang bukan klaim sepihak, bahwa PKS adalah

satu-satunya partai yang bersih dan peduli terhadap nasib rakyat. Namun maksudnya PKS menginginkan dan memperjuangkan seluruh komponen masyarakat akan lahirnya “Kepemimpinan Nasional yang Bersih dari Korupsi dan Peduli dengan Nasib Rakyat”.

Berikut ini adalah 21 Platform yang diagendakan oleh PKS; 14

1. Pemantapan Ekonomi Makro
2. Pemantapan Otonomi Daerah
3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
4. Perjuangan Petani
5. Perjuangan Buruh
6. Perjuangan Nelayan
7. Usaha Kecil dan Menengah
8. Politik Nasional
9. Pertahanan Keamanan
10. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
11. Politik Luar Negeri
12. Pendidikan Nasional
13. Kepeloporan Pemuda
14. Perempuan Indonesia
15. Pembinaan Keluarga
16. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
17. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
18. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri
19. Seni Budaya dan Pariwisata

---

<sup>14</sup> Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa “Platform Kebijakan PK-Sejahtera”*, (Jakarta; DPP PKS & al-I’tishom Cahaya Ummat, 2004), h. 58-63

## 20. Dakwah dan Pembinaan Ummat Beragama

## 21. Komunikasi dan Informasi

Selain 21 Platform yang dibangun, PKS juga mempunyai agenda principal bersama, diantaranya;<sup>15</sup>

1. Penegakan Hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar
2. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sebagai syarat minimal untuk pembangkitan ekonomi nasional
3. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya merupakan pangkal pemulihan jati diri dan kepribadian bangsa
4. Perekatan kembali (*Comentation*) jiwa keumatan dan kebangsaan, melalui peran kepemimpinan yang berkarakter pemersatu, pelayan dan teladan bagi seluruh rakyat
5. Penegakan kedaulatan bangsa, dimulai dengan memelihara batas-batas wilayah negara kesatuan, secara fisik, laut dan udara
6. Perlindungan harkat kemanusiaan
7. Berperan serta dalam mewujudkan wajah peradaban dunia

Selain itu PKS menentukan terobosan-terobosan yang diharapkan membawa perubahan fundamentalis dengan mengambil inisiatif kecil yang berdaya ungkit besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, antara lain;<sup>16</sup>

1. Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai role model kekuatan reformis
2. Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas public

---

<sup>15</sup> Hidayat Nurwahid, *Menyelamatkan Bangsa "Platform Kebijakan PK-Sejahtera"*, h. 46-48

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 49-56

3. Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi
4. Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan dengan memprioritaskan kepentingan ummat dan bangsa yang lebih luas
5. Membina moral generasi muda terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam menemukan jati diri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya
6. Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntunan syari'at serta kesantunan masyarakat
7. Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang
8. Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera seagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak
9. Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah Terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu
10. Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang kemudain berkemabang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
11. Mendukung Sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, dan bertanggungjawab sebagai mediator komunikasi public
12. Membangun gerakan rakyat (*civil society*) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing
13. Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (*think tank*) atau lembaga riset swasta dan pemerintah

14. Memompa jiwa sportifitas dalam beragam untuk kegiatan olahraga dan kependuan yang dapat memperkuat semangat bela negara
15. Membentuk posko kemanusiaan di sejumlah daerah konflik dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedic serta sukarelawan
16. Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan

### **c. PKS dan Islam Politik di Indonesia**

Hubungan antara negara dan ummat Islam di masa lalu banyak diwarnai dengan pengalaman gerakan-gerakan yang bahkan mengarah pada perlawanan dan pemberontakan.<sup>17</sup> Perlawanan tersebut disadari bersumber dari ide-ide dan dasar teoritis penciptaan masa depan kehidupan Indonesia. Ide dan konsep “Negara Islam” misalnya, adalah sebetulnya perbedaan yang mengarah kepada perlawanan yang sangat antara ummat Islam dan negara di awal-awal kemerdekaan.

Pemberlakuan UU yang mengatur hal-hal yang paling mendasar, seperti ideology sebuah ormas keagamaan atau asas sebuah partai politik – apalagi berbasis agama- menjadi penting agar mampu meredam semangat perlawanan yang nilai-nilainya memang tumbuh subur dalam ajaran-ajaran normatif agama. Atau setidaknya, dengan pengaturan pada level struktur kehidupan modern yang bernama negara, kehendak dan pandangan sebagian ummat dapat dibelokkan sesuai dengan kepentingan dan kehendak penguasa.

Konsepsi pembelokan atau pengarahannya itu bersumber dari penempatan agama sebagai *variable individual* dan dianggap tidak berhubungan dengan berbagai

---

<sup>17</sup> Lihat Kajian Tentang *pertentangan pemberontakan Islam*, misalnya; dalam Karl Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*; Kasus Darul Islam Jawa Barat, (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1990)

permasalahan politik kenegaraan. Disinilah letak gagasan modernisasi yang dipandang membawa serta didalamnya sekularisasi, yaitu berusaha menempatkan agama hanya sebagai modal dasar pembangunan dan arah perubahan social. Agama bersama kebudayaan dalam kedudukan fungsionalnya dipandang tidak memiliki hubungan structural dengan variable ekonomi, politik dan kenegaraan. Cara pandang semacam inilah yang menjadi landasan dikeluarkannya kebijakan UU No.05 Tahun 1985 yang dimaksudkan untuk menghapus ciri asas partai politik yang berasas Islam.

Dengan diberlakukannya UU tersebut pemerintah Orde Baru menunjukkan dengan berbagai cara ketidaksukaannya terhadap aksi-aksi mahasiswa dan ummat Islam. Sehingga perseteruan antara pemerintah dan mahasiswa pun tidak dapat dihindarkan. Puncaknya adalah ketika 1977 dan 1978, mahasiswa kembali bergerak dan membuat suhu politik memanas sehingga menyebabkan dikeluarkannya keputusan pembubaran *Student Government*. Namun, selang waktu yang tidak begitu lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan NKK/BKK yang memberikan control sepenuhnya gerakan mahasiswa kepada pihak birokrat kampus.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa keterpurukan kondisi masyarakat Islam atas rezim Orde Baru-lah yang kemudian menimbulkan ruang bagi mahasiswa untuk mencari strategi dan solusi yang kemudian menghantarkan mereka kedalam gerakan keagamaan yang berbasis kampus yang dikenal dengan nama gerakan dakwah kampus, sehingga kemudian dari para aktivis dakwah kampus inilah terlahir sebuah partai yang fenomenal yaitu Partai Keadilan dan kemudian mentransformasikan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

PKS merupakan partai Islam yang mempunyai tujuh karakteristik;

1. *Moralis*; PKS berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya atau berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam

2. *Profesional*; hal ini dimaksudkan kedalam pembentukan pribadi dengan memperhatikan aspek intelektualitas, sikap kritis dan sensitivitas yang lebih dalam aktivitas partai
3. *Patriotik*; kehidupan berpartai adalah perjuangan. Diatas landasan inilah semangat dikobarkan dalam upaya meraih cita-cita masa depan
4. *Moderat*; karakter ini sesungguhnya merupakan karakter Islam itu sendiri. Menurut DR. Yusuf Qordhowi, moderat (*al-Wasthiyah*) berarti keseimbangan (*at-tawazun*). Karakteristik moderat yang ditampilkan oleh PKS inilah yang menjadikan PKS berbeda dengan partai lain. Sikap kemoderatan PKS ditunjukkan pada saat masih bernama PK, yaitu saat menentukan untuk berkoalisi dengan PAN, dan juga saat memperjuangkan “Piagam Jakarta”, sedangkan partai Islam lain seperti; PPP, PBB, Masyumi memperjuangkan ide Amandemen UUD 1945
5. *Demokrat*; adalah menerima nilai-nilai universal demokrasi sebagai bentuk pengakuan kepada manusia dalam tanggungjawabnya sebagai khalifatullah
6. *Reformis*; PKS akan menempatkan posisinya sebagai reformis serta berusaha konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan
7. *Independen*; PKS menyatakan sebagai partai dakwah akan tetap berada pada posisi kemerdekaan (independensi) dalam artian yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Karakteristik-karakteristik yang dimiliki PKS merupakan gambaran dari ketidaksamaan PKS dengan Islam politik lain yang ada di Indonesia. Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak, akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk merealisasikan cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Sedangkan dalam bidang kesejahteraan umat Islam dapat dikatakan sebagai penghuni terbesar dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan. Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktifis dakwah Islam akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

---

<sup>18</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* hal 29-30

Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam merupakan bentuk transformasi terakhir yang dijalani oleh gerakan dakwah kampus, guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang, maka akhirnya merekapun sepakat untuk mengokohkan sebuah partai yang diberi nama Partai Keadilan.<sup>19</sup>

Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survey yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ke tengah public pada era reformasi, apakah bentuk organisasi massa atau organisasi politik, atau tetap mempertahankan penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam bentuk yayasan atau lembaga-lembaga dakwah.<sup>20</sup>

Bentuk transformasi GDK (Gerakan Dakwah Kampus) menjadi Partai Keadilan (PK) barangkali bentuk transformasi paling fenomenal yang dilakukan oleh gerakan dakwah ini. Dikatakan fenomenal karena beberapa alasan, diantaranya;

- 1) Pilihan mendirikan partai politik merupakan bentuk pemunculan publik yang paling utuh dari gerakan dakwah yang selama ini bergerak dengan banyak nama dan banyak kantong-kantongnya itu.
- 2) Pilihan untuk mendirikan partai politik itu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah diduga sebelumnya bahkan oleh para kadernya sendiri dan memicu kontroversi
- 3) Pilihan tersebut membawa konsekuensi pada masuknya gerakan dakwah ke dalam politik praktis dengan logika dan sistemnya sendiri yang di masa lalu merupakan sesuatu yang sempat mereka jauhi. Artinya selama ini trade mark mereka adalah aktivitas dakwah sedangkan berpolitik selama ini hampir-hampir mereka tidak pernah sentuh.<sup>21</sup>

Menurut Nur Mahmudi Isma'il (Presiden PK pertama), menyebut akar histories dari ideologis Partai Keadilan sangatlah panjang.<sup>22</sup> Karena itu sangat sulit untuk

---

<sup>19</sup> Sekretariat DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta : DPP Partai Keadilan, Desember 1998. Cet-1, h.18

<sup>20</sup> Ali Said Damanik, hal 228

<sup>21</sup> Ali Said Damanik, hal 215-216

<sup>22</sup> Republika 10 Agustus 1998, h.3. Sementara dalam Majalah Tempo, edisi 18 Januari 1999, h.58,

mengelompokkan mereka ke dalam genre politik tertentu, karena dalam sejarahnya pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik manapun.

Kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis Islam yang masa lalu direpresentasikan dengan baik oleh Masyumi-tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini juga mewakili aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi tersebut. Sebelumnya memang ada dugaan bahwa kelompok aktivis dakwah yang mendirikan Partai Keadilan ini mempunyai kedekatan emosional dan politik dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi dakwah yang didirikan para mantan aktivis Masyumi dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini sebelumnya berbasis. Akan tetapi pasca reformasi jelaslah sudah perbedaan diantara keduanya. DDII membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan anak-anak muda aktivis Tarbiyah ini mendirikan Partai Keadilan. Para aktivis gerakan dakwah ini memakai proses reformasi yang terjadi sebagai Harakatul Ishlah (gerakan perbaikan) yang merupakan buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ali Said Damanik, hal 220-221